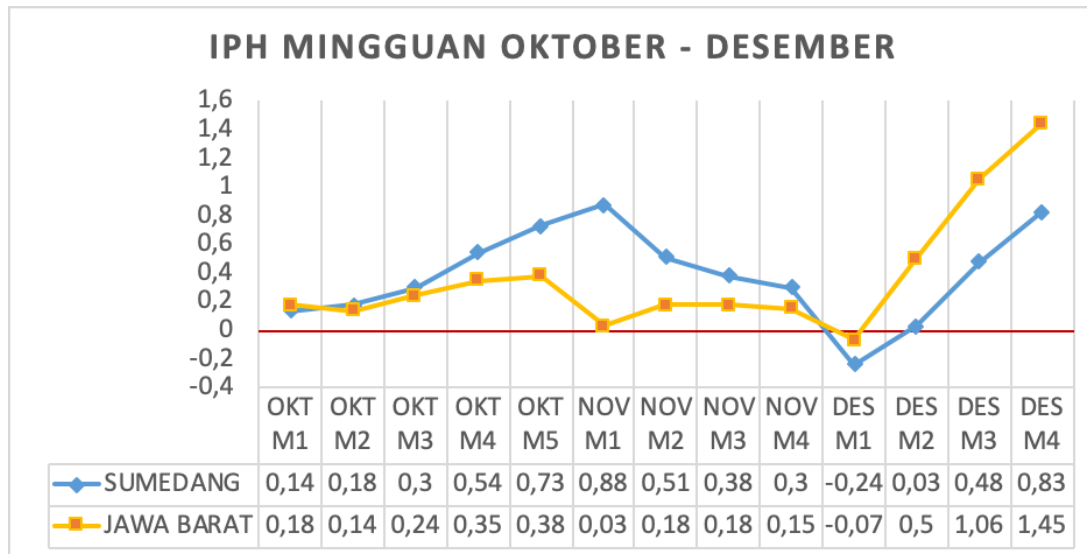


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi Kabupaten Sumedang pada Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik Indeks Perkembangan Harga sebagai berikut.



Berdasarkan grafik di atas, perkembangan IPH pada triwulan IV menunjukkan tren peningkatan stabil pada bulan Oktober dengan kenaikan bertahap dari 0,14% (M1 Oktober) hingga 0,73% (M5 Oktober). Pada November, IPH mencapai puncak tertinggi sebesar 0,88% di M1 November kemudian menurun hingga 0,3% di minggu keempat. Sedangkan pada bulan Desember, IPH sempat mengalami deflasi pada M1 Desember (-0,24%) tetapi kembali naik hingga mencapai 0,83% pada minggu keempat.

Komoditas yang memberikan andil terbesar perubahan IPH pada triwulan IV didominasi oleh bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng. Sementara pada Desember 2024, komoditas bawang putih, tahu mentah, dan cabai merah menjadi penyumbang perubahan IPH dalam kurun waktu 1-2 minggu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan harga komoditas pangan di Kabupaten Sumedang pada bulan Desember 2024.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada triwulan IV, kenaikan harga terjadi pada bulan Desember pada komoditas minyak goreng curah, cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, bawang merah, dan bawang putih. Hal ini disebabkan karena:

1. Kurangnya pasokan cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih;
2. Tingginya permintaan masyarakat menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru;
3. Pengaruh kenaikan harga di daerah sentra yang lebih besar dan telah mengikat para distributor.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka mengendalikan laju inflasi di Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah melaksanakan:

1. **Pemantauan harga dan stok** secara harian baik yang dilakukan oleh UPTD Pasar maupun OPD terkait lainnya yang turun langsung ke setiap pasar dan distributor. Pemantauan harga juga dilakukan melalui aplikasi SINDANG (Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang) yang menyediakan data harga dan pasokan secara realtime serta mampu mendeteksi potensi inflasi yang akan terjadi menggunakan metode SMA (*Simple Moving Average*). [Dashboard | sindang \(sumedangkab.go.id\)](https://dashboard.sindang.sumedangkab.go.id)
2. **Sidak pasar** bersama Satgas Pangan sebanyak 3 kali menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru
3. **Operasi Pasar Murah** sebanyak 12 kali dan **Gerakan Pangan Murah** sebanyak 2 kali periode Oktober - Desember 2024 yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perikanan dan Peternakan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Barat, Perum BULOG Kancab Bandung, dan distributor.
4. **Sosialisasi Diversifikasi Konsumsi Pangan yang Bergizi, Beragam, Berimbang dan Aman (B2SA)** yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Anggota TPPKK Kabupaten Sumedang.
5. **Pemenuhan beras CPPD** pada bulan Desember sebanyak 124,91 ton
6. **Penguatan lumbung pangan masyarakat** kepada 8 kelompok
7. **Peningkatan kapasitas kelompok tani** oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8. Gerakan **Program STARBAK** (Satu Desa Satu Hektar Buruh Tani Bangkit), berupa penanaman komoditas jagung hibrida yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani di lahan seluas satu hektar per desa yang disediakan Pemerintah beserta bantuan sarana produksi pertanian lainnya. Program ini berkolaborasi dengan FORKOPIMDA Kabupaten Sumedang dan Mahasiswa KKN Tematik
9. Peningkatan produksi pangan yaitu jagung, bawang merah, aneka cabai melalui **pengembangan budidaya, pengadaan benih, serta subsidi saprodi.**
10. **Peningkatan produksi hewan ternak** yaitu domba, sapi potong, sapi potong hasil IB, kambing, dan ayam kampung.

Gerakan penanaman komoditas hortikultura di pekarangan rumah dan **gerakan**

11.

tanam padi oleh Kelompok Tani, Pemerintah Desa, Penyuluh Pertanian, dan BABINKANTIBMAS serta BABINSA.

12. **Pembentukan kawasan hortikultura**

13. **Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani** untuk menjaga produksi pertanian

14. **Pengawasan dan pemantauan distribusi barang** melalui ATCS serta **pengaturan arus lalu lintas** di lapangan.

15. **Penyebarluasan informasi harga pangan** kepada masyarakat melalui penayangan infografis dan video di media sosial.

16. **High Level Meeting** sebanyak 2 kali menjelang Pilkada dan HBKN Natal dan Tahun Baru

17. **Rapat Koordinasi** Pengendalian Harga dan Pasokan.

18. **Rakor TPID oleh Kementerian Dalam Negeri serta Rakor Dwimingguan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kab/Kota se-Jawa Barat**

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana diuraikan pada poin 3 mampu mengendalikan laju inflasi di Daerah. Hal ini terbukti dengan perkembangan Indeks Perkembangan Harga pada Triwulan IV yang cenderung stabil dan tidak terlalu tinggi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dari berbagai kebijakan yang sudah dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui TPID harus senantiasa melaksanakan:

1. Sidak pasar pemantauan harga dan pasokan;
2. Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah;
3. Pencanaan gerakan menanam;
4. Mendukung pompanisasi dan optimalisasi infrastruktur irigasi;
5. Memastikan rantai pasok berjalan lancar;
6. Kerja Sama Antar Daerah;
7. Digitalisasi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan akses pasar, terutama bagi UKM;
8. Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola konsumsi bijak;
9. *High Level Meeting* dan Rapat Koordinasi; serta
10. Memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah lain untuk menghadapi tantangan inflasi.